

# ANALISIS KINERJA PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 KOTA BANDA ACEH

Rahmat Budiansyah  
NPP.29.0058

*Asdaf Kota Banda Aceh Provinsi Aceh  
Program Studi Keuangan Publik*

Email: rhmtansyah0@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** *The Covid-19 pandemic has not only had an impact on the health sector, but also on the economic sector. This is evidenced by the decrease in Banda Aceh City's Original Regional Revenue (PAD) during the Covid-19 pandemic. **Purpose:** to assess the performance of regional original income in 2018 to 2021 as well as the efforts made by the Banda Aceh City Financial Management Agency in optimizing regional original income during the Covid-19 pandemic. **Method:** The method used in this study is a descriptive qualitative method with an inductive approach and data collection techniques in the form of observation, documentation, and interview methods. The dimensions in this study are the analysis of the growth of regional original income and the ratio of the effectiveness of regional original income. **Results:** The results obtained from this study are based on growth analysis, the performance of regional original income in Banda Aceh City shows a negative trend or a decrease in the realization of regional original income from 2018-2021 and the effectiveness ratio of regional original income after analyzing that before the covid-19 pandemic in 2018 the effectiveness level of regional original income is still quite effective, in the following year, namely the 2019-2021 covid-19 pandemic, it has greatly impacted the receipt of regional original income which shows a decrease in the level. The Banda Aceh City Financial Management Agency has made various efforts to overcome these problems with several innovations: online tax monitoring, Cooperation for Central and Regional Tax Collection, BPHTB online application, Cooperation with PT Telkomsel regarding NSP, Tax Socialization Gowes (GoJak) and UMKM Go- Digital is expected to optimize the realization of local revenue in Banda Aceh City. **Keywords:** Performance Analysis, Regional Original Income, Covid-19 Pandemic*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dari adanya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh pada masa pandemi Covid-19 ini. **Tujuan:** untuk menilai kinerja pendapatan asli daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 serta upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah pada masa pandemi Covid-19. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data berupa metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dimensi dalam penelitian ini yaitu analisis pertumbuhan pendapatan asli daerah dan rasio efektivitas pendapatan asli daerah. **Hasil/Temuan:** Hasil yang didapat dari penelitian ini berdasarkan analisis pertumbuhan, kinerja pendapatan asli daerah di Kota Banda Aceh menunjukkan trend negatif atau terjadi penurunan realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2018-2021 dan rasio efektivitas pendapatan asli daerah setelah dianalisis bahwa sebelum adanya pandemi covid-19 pada tahun 2018 tingkat efektivitas pendapatan asli daerah masih cukup efektif, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019-2021 pandemi covid-19 sangat berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah yang menunjukkan penurunan tingkat. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan beberapa inovasi: monitoring pajak online, Kerjasama Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah, aplikasi online BPHTB, Kerjasama dengan PT Telkomsel Terkait NSP, Gowes Sosialisasi Pajak (GoJak) dan UMKM Go-Digital yang diharapkan dapat mengoptimalkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Banda Aceh.

**Kata Kunci :** Analisis Kinerja, Pendapatan Asli Daerah, Pandemi Covid-19

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mengatur sendiri kepentingan guna mengurus daerahnya sendiri. Provinsi Aceh diberikan kewenangan khusus dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan prinsip Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah memiliki fungsi yang harus terlaksana dengan semaksimal mungkin, dengan disalurkan sumber pendapatan yang cukup kepada daerah. Sumber pendapatan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber pendapatan daerah.

Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam rangka pelaksanaan anggaran daerah, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan

pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Salah satu unsur pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan realisasi anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran, analisis laporan keuangan dapat dilakukan dalam bentuk analisis pendapatan. Keuangan daerah adalah kekayaan daerah yang dimiliki dan diakui oleh suatu daerah atau negara yang lebih tinggi dalam bentuk kekayaan, dapat berupa uang atau komoditas atau barang, dalam hal ini didasari dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Laporan tersebut membandingkan pendapatan dan pengeluaran anggaran tahunan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, juga dapat mengetahui penggunaannya pada periode tersebut. Untuk setiap periode kejadian, laporan realisasi ini akan dilakukan perbandingan yang meliputi dari sumber dana, lokasi penyaluran dan cara penggunaannya. Diketahui bahwa pendapatan asli daerah yang di kelola pemerintah kota Banda Aceh mengalami penurunan selama terjadinya pandemi covid-19. Dengan adanya penurunan pendapatn asli daerah dalam beberapa tahun kebelakang dapat membuat pemerintah agar lebih baik lagi dalam mengelola keuangan Kota Banda Aceh, dikarenakan saat ini Negara sedang mengalami pandemi Covid-19 yang membuat segala kegiatan terbatas dan menjadi tantangan bagi pemerintah kota dalam mengelola keuangan agar perekonomian tidak menurun yang berdampak kepada masyarakat, maka pemerintah harus dapat mengoptimalkan segala sumber pendapatan agar anggaran yang direalisasikan dapat berdampak bagus untuk perkembangan kota Banda Aceh. Dengan adanya pandemi Covid-19, masyarakat tidak dapat beraktifitas seperti biasanya. Pandemi covid-19 yang membuat semua aktifitas yang bersifat keramaian tidak dapat dilakukan, guna menurunkan tingkat penularan virus covid-19.

Di lingkungan pemerintahan kota Banda Aceh, Badan Pengelola Keuangan Kota Banda Aceh merupakan salah satu instansi atau instansi yang mendukung visi walikota. Badan Pengelola Keuangan Kota dimaksudkan untuk terus berinovasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas mengelola keuangan dan aset Kota Banda Aceh. Badan Pengelola Keuangan Kota berperan penting dalam pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh dengan menyusun strategi untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Salah satunya bekerja sama dengan Bank Aceh Syariah untuk mengembangkan sistem yang dapat memantau transaksi bisnis wajib pajak secara efektif. Hadirnya sistem monitoring pajak *online* tersebut diharapkan mampu meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Hambatan Badan Pengelolaan Keuangan Kota dalam pencapaian target pendapatan aslidaerah sangat terasa pada penerimaan pajak yang menurun selama masa pandemi covid-19, terutama pada penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Kota menerapkan kelonggaran pajak dengan tidak menghapus pajak dengan

mencencil dan keringanan denda, sehingga di akhir tahun anggaran diharapkan dapat terealisasi sesuai target.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis sebagai karya ilmiah guna bahan perbandingan sekaligus pedoman penulis. Penelitian sebelumnya menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Pertama, penelitian Elisabeth Mbembe (2018) yang berjudul Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah. Menemukan bahwa Pendapatan asli daerah sudah meningkat setiap tahunnya tetapi pendapatan asli daerah belum berkontribusi dengan baik terhadap pendapatan daerah. Kedua, penelitian Rusdi (2018) yang berjudul Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Menemukan bahwa Tingkat efektif dan efisiensi anggaran dinilai sudah cukup baik. Ketiga, penelitian Ladi Lampa dan Harijanto Sabijono (2012) yang berjudul Analisis Kinerja Pendapatan Pada Dinas Pengelolah Keuangan Asset Dan Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. Menemukan bahwa Kinerja pendapatan dilihat dari analisis rasio keuangan masih rendah dan masih cenderung menurun dan menurut analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah tergolong sangat efektif dalam merealisasikan pendapatannya. Keempat, penelitian oleh Djufri Rays Pattilouw (2018) yang berjudul Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Buru Selatan. Menemukan bahwa Belum optimalnya perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Kelima, penelitian Cepi Triana Safari (2019) yang berjudul Analisis Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Menemukan bahwa Kinerja pendapatan daerah dinilai kurang baik dan termasuk kategori tidak menguntungkan atau disebut unfavourable variance

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan dan informan yang baru dan berbeda. Sementara itu pada penelitian kali ini dilakukan pada saat pandemi *covid-19*. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja pendapatan asli daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 serta upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah pada masa pandemi Covid-19.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dialami subyek penelitian dari masalah yang terjadi (Creswell, 2016:3). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan informan diperoleh secara *purposive sampling* dengan narasumber Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh (1 orang), Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan pajak (1 orang), Kepala Bidang Penagihan (1 orang), Kepala Subbidang PENilaian dan Verifikasi PELaporan Pajak (1 orang). Teknis analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dibahas menggunakan Teori analisis (Mahmudi, 2016) dengan dimensi analisis pertumbuhan pendapatan asli daerah dan rasio efektivitas pendapatan asli daerah.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Analisa Kinerja Pendapatan Asli Daerah

Peneliti dalam menganalisis kinerja pendapatan daerah menggunakan Teori analisis (Mahmudi, 2016) dengan dimensi analisis pertumbuhan pendapatan asli daerah dan rasio efektivitas pendapatan asli daerah.

##### A. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Diketahui bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah setelah dilakukan penghitungan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**

No	Tahun	Pertumbuhan PAD	%
1	2018-2019	- 11.149.076.320,66	- 4,52
2	2019-2020	- 7.375.453.820,62	- 3,13
3	2020-2021	- 35.219.600.427,43	- 15,46

Sumber: diolah penulis, 2022

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat dilihat kinerja pendapatan asli daerah di Kota Banda Aceh menunjukkan *trend* negatif atau terjadi penurunan realisasi pendapatan asli daerah. Pandemi covid-19 mengharuskan pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh untuk dapat melakukan berbagai upaya atau strategi dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan.

## B. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Diketahui rasio efektivitas pendapatan daerah setelah dilakukan penghitungan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**

No	Tahun	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas %
1	2018	271.470.773.450,00	246.272.150.484,71	90,72
2	2019	270.173.808.636,00	235.123.074.164,05	87,03
3	2020	254.081.184.909,00	227.747.620.343,43	89,64
4	2021	312.891.768.307,00	192.528.019.916,00	61,53

Sumber: diolah penulis, 2022

Realisasi pendapatan asli daerah di Kota Banda Aceh pada masa pandemi covid-19 terjadinya penurunan tingkat efektivitas dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, dapat dilihat bahwa sebelum adanya pandemi covid-19 pada tahun 2018 tingkat efektivitas pendapatan aslidaerah masih cukup efektif. Pada tahun 2019 munculnya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia, khususnya Kota Banda Aceh sangat berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah yang menunjukkan penurunan tingkat efektivitas pendapatan asli daerah di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas sedikit meningkat dikarenakan adanya penurunan target realisasi dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh. Kemudian pada tahun 2021 tingkat efektivitas pendapatan asli daerah mengalami penurunan menjadi tidak efektif.

### 3.2. Upaya Yang Dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh Dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19

### **A. Monitoring Pajak Online**

Pada akhir tahun 2019, alat ini telah dipasang pada 30 wajib pajak hotel dan restoran yang ada di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini, Bank Aceh Syariah menanggung semua biaya tanpa membebani APBD. Pelaksanaan pemasangan *tapping box* pada wajib pajak yang terpilih selesai dalam waktu 2 bulan dalam pemasangan dan peluncuran aplikasi pada tanggal 10 maret 2020.

Untuk tahun 2021, Pemerintah Kota Banda Aceh telah mendata sebanyak 30 tempat usaha wajib pajak yang akan terpasang perangkat *tapping box*. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh bersama PT Bank Aceh Syariah telah melakukan peninjauan kerja sama dengan dua calon vendor penyedia dan maintenance alat *tapping box*. Namun, yang seharusnya perencanaan pemasangan *tapping box* pada 30 wajib pajak tersebut dilaksanakan pada akhir tahun terkendala dikarenakan masih adanya proses administrasi yang perlu disiapkan dan ditargetkan untuk pemasangan dilakukan pada awal tahun 2022.

### **B. Kerjasama Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah**

Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Dirjen Pajak dan Direktorat Perimbangan Keuangan tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu maksud dan tujuan dari penandatanganan perjanjian kerjasama ini adalah pertukaran dan pemanfaatan data perpajakan, perizinan serta informasi keuangan daerah antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. September 2021, telah dilakukan pertukaran data sebanyak 30 usaha wajib pajak yang ada di Banda Aceh dengan Dirjen Pajak dan Direktorat Perimbangan Keuangan. Tujuan lain yang ingin dicapai melalui kerjasama ini, yakni mengoptimalkan pemanfaatan program peningkatan pelayanan perpajakan kepada masyarakat dan meningkatkan pendampingan serta dukungankapasitas di bidang perpajakan dalam meningkatkan pengetahuan kemampuan aparatur bidang perpajakan.

### **C. Aplikasi Online BPHTB**

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh terus melakukan transformasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Transformasi digital tersebut diwujudkan dengan membangun aplikasi *online e-BPHTB*. Hadirnya aplikasi tersebut diharapkan akan mempermudah para wajib pajak dalam melakukan pelaporan, pembayaran dan verifikasi pembayaran Bea Perolehan Ha kata Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kehadiran aplikasi tersebut diharapkan akan meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan sehingga akan meningkat penerimaan daerah sector BPHTB. Aplikasi e-BPHTB dikembangkan langsung secara mandiri oleh Tim IT Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh yang tujuannya melepas ketergantungan pada pihak ketiga dan lebih leluasa dalam melakukan pengembangan. Aplikasi e-BPHTB Kota Banda Aceh juga sudah terintegrasi dengan Pusdatin-BPN dan aplikasi PBB (sismiop) serta aplikasi e- setor yang terintegrasi dengan Bank Aceh Syariah dan ini merupakan suatu upaya dalam

meningkatkan pelayanan kepada publik.

#### **D. Kerjasama Badan Pengelolaan Keuangan Kota dengan PT Telkomsel Terkait NSP**

Pada awal tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh meluncurkan NadaSambung Pribadi (NSP) salah satu lagu daerah Banda Aceh yaitu “Banda Aceh Gemilang” karya musisi lokal Yusis Ishak. Peluncuran NSP tersebut hadir sebagai tindak lanjut digitalisasi dalam meraih peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penggunaan NSP dalam mendapat penerimaan daerah merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Penggunaan inidiharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan biaya sebesar Rp 9.900 NSP “Banda Aceh Gemilang” dapat dinikmati selama 1 bulan penuh bagi para pelanggan. Berdasarkan pelaksanaannya, hasil penerimaan yang didapatkan dari layanan NSP ini per-aktivitas direncanakan sebanyak 15-20%. Inovasi yang dihadirkan ini jelas memiliki dampak positif bagi Kota Banda Aceh, lirik dan lantunan lagu Banda Aceh Gemilang mempunyai makna sejarah serta gambaran bagaimana Gemilangnya Kota Banda Aceh. Dengan begitu, efek yang dirasakan juga dapat merambah ke sector lainnya seperti pariwisata dan ekonomi serta memiliki *multiplier effect* bagi perkembangan Kota Banda Aceh.

#### **E. Gowes Sosialisasi Pajak (Gojak)**

Sosialisasi pajak langsung ke tempat usaha wajib pajak ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk melunasi kewajibannya setiap bulan sebelum tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Harapannya, dengan meningkatkan kesadaran para wajib pajak tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh. September 2021, Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh melalui Tim GoJak telah meyambangi 200 tempat usaha wajib pajak baru yang ada di Kota Banda Aceh. Sembari melakukan sosialisasi secara verbal, Tim GoJak juga membagikan pamphlet maklumat pajak dan banner sosialisasi pajak pada setiap tempat usaha pajak yang dikunjungi.

#### **F. UMKM Go-Digital**

Pada masa pandemi covid-19, Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh mengambil langkah strategis untuk mendampingi para wajib pajak pengelola usaha kafe/restoran untuk meningkatkan penjualan dengan ekspansi bisnis ke ranah digital. Pendampingan itu dilakukan dengan mendaftarkan usaha milik wajib pajak yang potensial ke aplikasi pemesanan makanan online seperti GoFood, GrabFood, Maxim dan sebagainya. Diharapkan, pendampingan tersebut dapat membawa dampak positif yaitu meningkatkannya omset penjualan sehingga target penerimaan pajak daerah dapat tercapai.

### **3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Peneliti menemukan bahwa kinerja pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh cenderung

menurun sejak sebelum pandemi dan diperparah pada saat pandemi tahun 2020 dan 2021. Layaknya temuan Lady Lampa dan Harijanto Sabijono (2012) yang menemukan bahwa Kinerja pendapatan dilihat dari analisis rasio keuangan masih rendah dan masih cenderung menurun dan menurut analisis rasio efektivitas pendapatan asli daerah tergolong sangat efektif dalam merealisasikan pendapatannya (Lampa & Sabijono, 2012).

Meskipun dalam kondisi yang menurun akan tetapi peneliti menemukan bahwa pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh masih mampu membiayai pembelajaran daerah dan masuk kategori menguntungkan. Berbeda dengan temuan Cipi Triana Safari (2019) yang menemukan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Garut dinilai kurang baik dan termasuk kategori tidak menguntungkan atau disebut *unfavourable variance* (Safari, 2019).

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa kinerja pendapatan asli daerah di Kota Banda Aceh menunjukkan *trend* negatif atau terjadi penurunan realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2018-2021 dan rasio efektivitas pendapatan asli daerah setelah dianalisis bahwa sebelum adanya pandemi covid-19 pada tahun 2018 tingkat efektivitas pendapatan asli daerah masih cukup efektif, pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019-2021 pandemi covid-19 sangat berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah yang menunjukkan penurunan tingkat. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan beberapa inovasi: monitoring pajak online, Kerjasama Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah, aplikasi online BPHTB, Kerjasama dengan PT Telkomsel Terkait NSP, Gowes Sosialisasi Pajak (GoJak) dan UMKM Go-Digital yang diharapkan dapat mengoptimalkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Banda Aceh.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Serta penelitian hanya pada wilayah tertentu yang mudah dijangkau.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh beserta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

#### **VI. DAFTAR PUSTAK**

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. PT. Pustaka
- Heryana, Ade. 2018 Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif Jurnal Defis, Volume 1 (Edisi 1), 1-22.
- Kusriyah, Sri. 2019. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: Unissula Press
- Mahmudi. 2021. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Pattilouw, Djufri Rays. (2018). Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Buru Selatan. *Jurnal Ekonomi*, Volume XII, No 1  
Pelajar.
- Safari, Cipi Triana. (2019). Analisis Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Volume 11 No 2, 66-78.
- Setiawan, M Iwan. (2017). Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah. Sinurat,
- Marja. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia  
Yogyakarta: UPP STIM YKPN

